



9 772088 235001

UPAYA MEWUJUDKAN **ROADMAP TRANSMIGRASI 2025–2026**

Ulayya Sarfina*

Abstrak

Program transmigrasi di Indonesia telah berkembang dari pendekatan top-down pada era Orde Baru menjadi model yang lebih inklusif dan berbasis desentralisasi setelah reformasi. Kajian ini membahas roadmap dan strategi pelaksanaan transformasi transmigrasi tahun 2025–2026. Roadmap Transmigrasi 2025–2026 menekankan transformasi kawasan melalui konsep Transpolitan, yang mengedepankan pembangunan perkotaan terpadu, kolaborasi multipihak, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan diversifikasi mata pencaharian. Lima program unggulan – Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong (5T) – difokuskan pada penyelesaian masalah lahan, pengembangan ekonomi lokal, pembentukan kader pembangunan, dan peningkatan infrastruktur. Implementasinya menitikberatkan integrasi lintas sektor, pemberdayaan transmigran, digitalisasi, serta optimalisasi lahan tidur untuk pusat ekonomi baru. Untuk memastikan transformasi ini berjalan optimal, sinergi berkelanjutan diperlukan, di mana Komisi V DPR RI mendukung perencanaan, pengawasan, serta mendorong inovasi kebijakan yang menjaga kesinambungan program dan mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan berdaya saing.

Pendahuluan

Transmigrasi merupakan instrumen pembangunan dengan tujuan pemerataan penduduk, ketahanan pangan, dan pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi. Di masa Orde Baru, transmigrasi dilaksanakan dengan pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa secara top-down, di mana pemerintah pusat menentukan lokasi dan pesertanya. Pasca era reformasi, paradigma transmigrasi mengikuti asas desentralisasi, sehingga lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal (Chalid, 2024). Namun, pelaksanaannya kerap menuai kritik, termasuk anggapan bentuk dominasi kultural yang memicu konflik sosial di sejumlah daerah dan mendorong sebagian transmigran kembali ke daerah asal (Pratiwi dkk., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan peran transmigrasi meredup dalam agenda pembangunan nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menegaskan pentingnya transmigrasi yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini menargetkan

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: ulayya.sarfina@dpr.go.id

transformasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional agar menjadi simpul ekonomi lokal yang berdaya saing. Sejalan dengan itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menerbitkan landasan regulatif yaitu Peraturan Menteri Transmigrasi (Permentrans) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi. Transmigrasi diposisikan sebagai strategi pembangunan jangka panjang dengan perhatian khusus terhadap 154 kawasan. Implementasinya diperkuat melalui penyerahan 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran di Sukabumi yang tertahan selama 24 tahun (Kementrans, 2025) dan keberangkatan 2.000 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) untuk mendukung penyusunan strategi pengembangan ekonomi daerah (Kurniawan, 2025). Kajian ini membahas roadmap dan strategi pelaksanaan transformasi transmigrasi 2025–2026.

Roadmap Transmigrasi 2025 dan 2026

Transformasi transmigrasi berangkat dari capaian historis, di mana sampai tahun 2025, program transmigrasi telah memberangkatkan 29,2 juta jiwa, membangun 3.672 satuan permukiman, menciptakan 1.567 desa definitif, hingga melahirkan 116 ibu kota kabupaten/kota dan 3 ibu kota provinsi baru (Kementerian Transmigrasi, t.t.). Selain itu, persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional adalah 52,88% sampai tahun 2024 (Bappenas, 2025). Berdasarkan RPJMN 2025–2029, fokus program transmigrasi adalah pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal yang menjadi penggerak ekonomi wilayah sekitarnya. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dasar, redistribusi aset tanah, peningkatan kualitas SDM transmigran, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Indikator keberhasilannya akan diukur melalui peningkatan jumlah desa maju dan mandiri, kenaikan pendapatan per kapita, peningkatan indeks transformasi kawasan, dan kontribusi transmigrasi terhadap kemandirian desa.

Selaras dengan itu, Kementrans menetapkan *Roadmap* Transmigrasi 2025 yang menempatkan transmigrasi sebagai bagian integral dari Proyek Strategis Nasional (PSN). *Roadmap* ini dijalankan dengan pendekatan *quality over quantity*, yang menekankan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi unggulan yang terintegrasi, tidak hanya berbasis pertanian, tetapi juga maritim, perikanan, hingga pariwisata sesuai potensi lokal. *Roadmap* tersebut dirumuskan menjadi lima program unggulan Kementrans yang diatur dalam Permentrans Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong (5T).

Pertama, Trans Tuntas yang berfokus menyelesaikan isu mendasar di kawasan transmigrasi, terutama terkait status lahan, konflik kepemilikan, serta pemenuhan hak transmigran. Melalui pendataan akurat, penyelesaian hukum, dan sertifikasi lahan, program ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperjelas kepemilikan aset. *Kedua*, Trans Lokal, yang berfokus pada penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat tanpa mengharuskan perpindahan jauh. Program ini mengedepankan pemanfaatan potensi lokal

untuk menekan arus urbanisasi, membentuk pusat pertumbuhan baru, dan menciptakan desa yang mampu berkembang menjadi kota mandiri.

Ketiga, Trans Patriot (Tim Ekspedisi Patriot, TEP) berfokus pada pembentukan kader pembangunan berjiwa pengabdian dan berkompetensi tinggi, melibatkan mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, dan tenaga profesional muda untuk menjadi motor penggerak sosial maupun ekonomi di kawasan transmigrasi. *Keempat*, Trans Karya Nusantara, yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kawasan dengan optimalisasi potensi unggulan lokal, seperti pertanian, perikanan, hingga pariwisata melalui dukungan investasi, pelatihan SDM, dan kolaborasi dunia usaha. *Terakhir*, Trans Gotong Royong, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, memperkuat harmoni sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui kolaborasi berbagai pihak.

Target implementasi *roadmap* transmigrasi 2026 dipaparkan dalam Rapat Kerja Kementerian dengan Komisi V DPR RI, 7 Juli 2025. *Pertama*, percepatan penerbitan Sertifikat Hal Pengelolaan Lahan (SHPL) 2.308,79 hektar lahan transmigrasi dan SHM 15.687 bidang tanah melalui Trans Tuntas. *Kedua*, pembangunan 280 rumah dan fasilitas umum melalui Trans Lokal. *Ketiga*, penyediaan beasiswa S2 dan S3 bagi 1.500 kader patriot serta pendanaan penelitian bagi 225 orang TEP. *Keempat*, revitalisasi 10 lembaga ekonomi dan pendampingan 25 kelompok masyarakat melalui Trans Karya Nusantara. *Kelima*, peningkatan infrastruktur berupa 47 sekolah, 16 km jalan, dan 115 jembatan melalui Trans Gotong Royong (Komisi V DPR RI Channel, 2025).

Strategi Dalam Implementasi *Roadmap* Transmigrasi

Implementasi *roadmap* transmigrasi 2025 diarahkan melalui konsep Transpolitan, yaitu pengembangan kawasan transmigrasi dengan skala perkotaan yang modern, inklusif, dan berbasis potensi daerah. Konsep ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi serta dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan dengan prinsip integrasi lintas sektor dan penguatan kapasitas SDM transmigran, sehingga kawasan transmigrasi tidak lagi dipandang sebagai pemukiman terisolasi, melainkan sebagai simpul pertumbuhan sosial-ekonomi yang dinamis (Sukarno dkk. 2023).

Strategi implementasi Transpolitan terdiri dari beberapa faktor. *Pertama*, integrasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media (*pentahelix*) dalam perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan. *Kedua*, pemberdayaan masyarakat dan transmigran secara inklusif untuk membangun harmonisasi sosial dalam pengembangan kawasan. *Ketiga*, penguatan SDM melalui pendidikan formal, vokasi, program beasiswa, dan penugasan TEP, sehingga transmigran mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial di kawasan baru. Transpolitan juga menekankan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam perencanaan, pemetaan potensi ekonomi, dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya.



Lebih lanjut, dari 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, pemerintah menetapkan beberapa kawasan sebagai *pilot project* transmigrasi 2025, antara lain Melolo (Sumba Timur), Rempang (Batam), Kuala Jelai (Sukamara), Arut Selatan dan Kotawaringin Lama (Kotawaringin Barat), serta Lamunti Dadahup (Kapuas) (“Transmigrasi 2025 Melejit!”, 2025). Pengembangan kawasan di Melolo diarahkan pada industri berbasis tebu dengan potensi energi hingga 22 MW, sementara di Rempang dikembangkan konsep Transpolitan yang terintegrasi dengan rencana Rempang *Eco-City* (Maharani & Alexander, 2025).

Program transmigrasi menghadapi sejumlah kendala seperti konflik sosial (di Rempang), minim infrastruktur dasar, dan persepsi negatif transmigrasi sebagai pemindahan penduduk semata. Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan strategi seperti menunda investasi di area konflik, memperkuat program Trans Lokal, kolaborasi lintas sektor melalui model *pentahelix*, menugaskan TEP pada program Trans Patriot, serta mempromosikan model transmigrasi sebagai pembangunan kawasan modern melalui forum internasional seperti Indonesia Cooperation Initiative (ICI) 2025. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai target roadmap yang telah ditetapkan. Keberhasilan upaya ini bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menangani tantangan sosial melalui pendekatan partisipatif yang berkelanjutan.

Penutup

Roadmap transformasi transmigrasi 2025-2026 menjadikan program ini sebagai instrumen pembangunan wilayah yang modern, adaptif, dan berkelanjutan melalui konsep Transpolitan, yang berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan, integrasi lintas sektor, kolaborasi multipihak, adopsi teknologi, penguatan SDM transmigran, serta diversifikasi mata pencaharian. Pendekatan ini memungkinkan transmigrasi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru, memperkuat kemandirian masyarakat, dan menjadi laboratorium inovasi sosial ekonomi. Keberhasilan *roadmap* tercermin dari capaian target strategis program unggulan 5T, dari penyelesaian lahan hingga penugasan TEP.

Sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program transmigrasi. Komisi V DPR RI berperan penting mendukung hal ini melalui perencanaan, pemantauan, alokasi sumber daya, dan inovasi kebijakan yang memperkuat dampak sosial-ekonomi, memastikan keberlanjutan program, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing di kawasan transmigrasi.



Referensi

- BChalid, I. (2024). *Transmigrasi: Dari diferensiasi menuju kohesi sosial*. Deepublish.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029*.
- Kementrans. (2025, Juni 26). Menteri Transmigrasi evaluasi arah program kerja. <https://www.transmigrasi.go.id/kementerian/>
- Kementrans. (2025, Juni 7). Melalui ICI 2025 kementerian transmigrasi perkenalkan paradigma baru di skala internasional. <https://www.transmigrasi.go.id/international-conference-on-infrastructure/>
- Kementrans. (n.d.). *Hasil transmigrasi sejak desember 1950 sampai sekarang*, <https://www.transmigrasi.go.id/>
- Komisi V DPR RI Channel. (2025, Juli 7). *Breaking news - Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Bhgkj2Xw6Bs>
- Kurniawan, A. (2025, Agustus 31). Menteri transmigrasi komitmen kembangkan 154 kawasan Indonesia. [https://rri.co.id/daerah/1807151/menteri-transmigrasi-komitmen-kembangkan-154-kawasan-indonesia](https://rri.co.id/daerah/1807151/)
- Maharani, A. S. A. & Alexander, H. B. (2025, Maret 25). 10 kawasan transmigrasi yang jadi pilot project 2025. *kompas.com*. <https://ikn.kompas.com/read/2025/03/25/164639887/10-kawasan-transmigrasi-yang-jadi-pilot-project-2025-ikn-tak-termasuk?page=all>
- Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.019>
- Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). Transpolitan: Kebijakan pembangunan transmigrasi masa depan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1). <https://doi.org/10.31258/Jkp.V14i1.8157>
- Transmigrasi 2025 melejit! (2025, Juli 30). *Kaltengpedia*. <https://www.kaltengpedia.com/transmigrasi-2025-melejit-1-394-kk-siap-tempati-wilayah-baru-naik-10-kali-lipat-dari-2024/>

